

Implementasi Quality Frame Work di Propinsi DIY

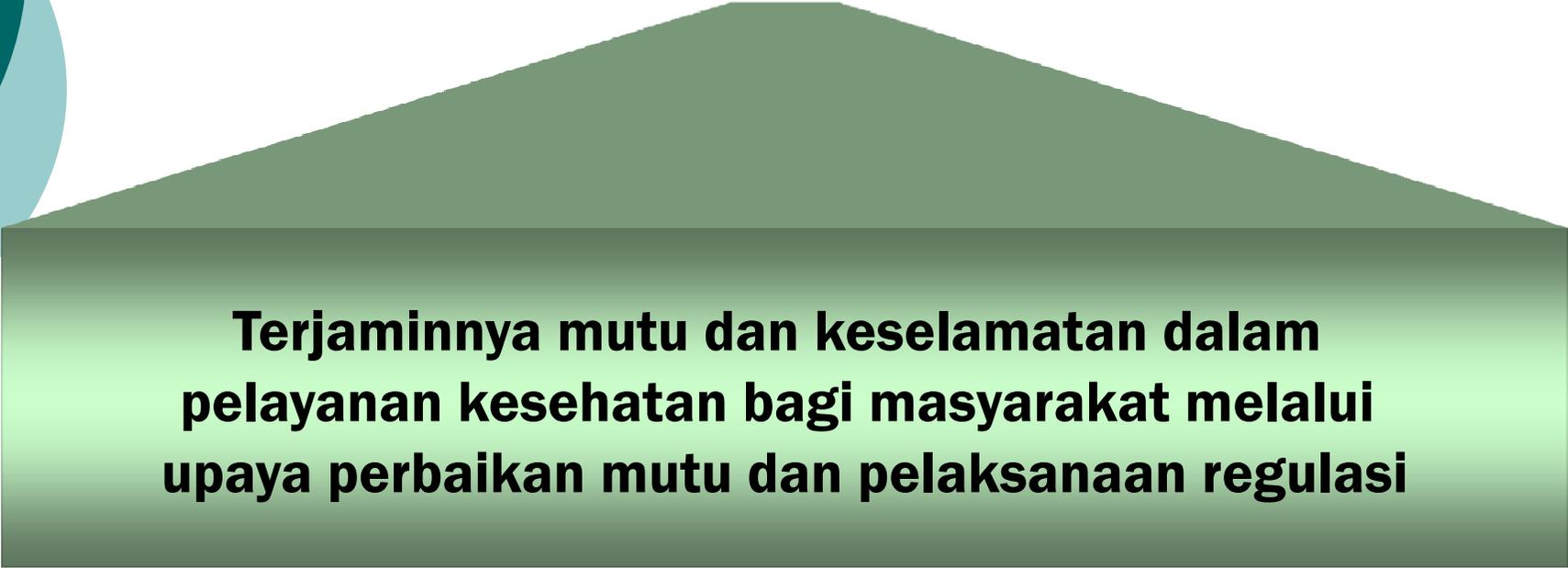
Bondan Agus Suryanto

Penyusunan kerangka kerja mutu melalui tahapan:

- **Penetapan tujuan penyusunan kerangka mutu, visi, misi dimensi mutu prioritas**
- **Validasi dimensi mutu oleh stakeholder dan pakar**
- **Penyusunan sasaran mutu, strategi, kebijakan, program serta indikator keberhasilannya**



Visi dan misi perbaikan mutu dan regulasi pelayanan kesehatan Propinsi DIY



**Terjaminnya mutu dan keselamatan dalam
pelayanan kesehatan bagi masyarakat melalui
upaya perbaikan mutu dan pelaksanaan regulasi**

Misi

- **Meningkatkan keamanan, akses, dan akuntabilitas pelayanan kesehatan pemerintah dan swasta**
- **Menyediakan tenaga kesehatan yang kompeten dalam memberikan pelayanan kesehatan**
- **Menyediakan pelayanan kesehatan dan sistem regulasi pelayanan yang efektif**

Strategi perbaikan mutu dan regulasi

Dimulai dari.....

Pelaksanaan peran Dinas Kesehatan sebagai penetap kebijakan regulasi dengan implementasi regulasi oleh Dinas kesehatan ataupun bekerja sama dengan badan independen (Badan Mutu Pelayanan Kesehatan)

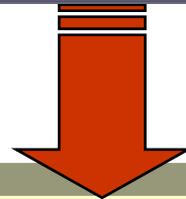


Penyusunan rencana pengembangan sumber daya manusia kesehatan untuk memenuhi persyaratan kompetensi dan registrasi

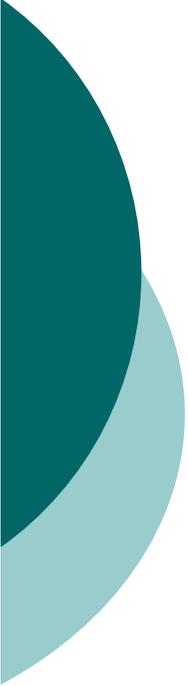
Strategi perbaikan mutu dan regulasi

dilanjutkan
dengan.....

Penyusunan standar dan prosedur pelaksanaan regulasi, melalui perijinan, sertifikasi dan akreditasi



Pelaksanaan uji kompetensi dikaitkan dengan kewenangan propinsi untuk mengeluarkan surat penugasan bagi tenaga kesehatan dan rekomendasi oleh organisasi profesi , dsb



Perangkat yang digunakan dalam perbaikan mutu

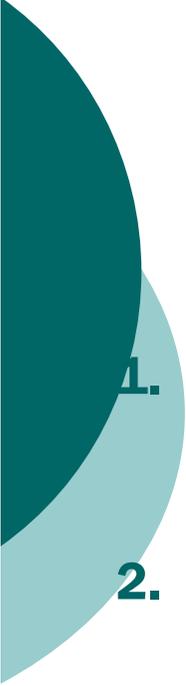
Standard dan uji kompetensi tenaga kesehatan

Indikator kinerja pelayanan Puskesmas

Indikator kinerja dan indikator mutu klinis untuk rumah sakit

Standar-standar pelayanan

Standard dan instrumen perijinan sarana pelayanan kesehatan,dll



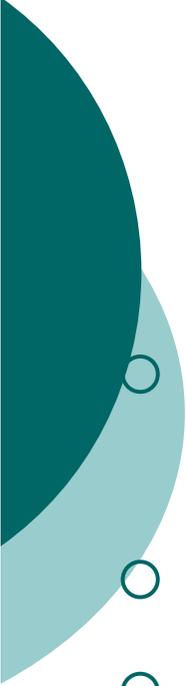
Peningkatan infrastruktur sebagai fondasi pelayanan kesehatan

- 1. Perbaiki kegiatan surveilens, sistem informasi dan fasilitas pelayanan kesehatan**
- 2. Peningkatan cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dengan anggaran kesehatan pemerintah**
- 3. Peningkatan koordinasi pemerintah di berbagai lini**
- 4. Peningkatan SDM kesehatan**
- 5. Penyusunan regulasi kesehatan**



Program perbaikan mutu yang dilaksanakan di Propinsi DIY

- **Penyusunan standar perijinan bagi sarana pelayanan kesehatan**
- **Penyelenggaraan uji kompetensi dan perijinan tenaga kesehatan**
- **Pengembangan indikator kinerja sarana pelayanan kesehatan**
- **Penerapan sistem manajemen mutu di setiap sarana pelayanan kesehatan**
- **Pelaksanaan akreditasi bagi sarana pelayanan kesehatan rumah sakit maupun pelayanan medik dasar**



Dimensi mutu prioritas untuk Propinsi DIY

- **Komunikasi interpersonal (*Interpersonal communication, respect and caring*)**
- **Akses (*accessibility*)**
- **Kompetensi teknis (*technical competence*)**
- **Kenyamanan (*amenities*)**
- **Efektivitas (*effectiveness*)**
- **Keselamatan (*safety*)**
- **Akuntabilitas (*accountability*)**

Dimensi Mutu Prioritas	Upaya Pemantauan	Scope Pengukuran	Indikator Keberhasilan	Organisasi Pelaksana
Aksesibilitas	Perijinan, Akreditasi, Sertifikasi	Jarak, biaya, Coverage insurance	% sarana kesehatan yang terakreditasi % sarana kesehatan yang berijin	Badan Mutu, Lembaga eksternal lain
Akuntabilitas	Akreditasi, Sertifikasi	Waktu tunggu, jam pelayanan, Ketepatan Pelayanan	% sarana kesehatan yang terakreditasi	Lembaga eksternal lain
Keselamatan	Perijinan	Patient Safety	% tenaga kesehatan yang Mempunyai ijin praktek % sarana kesehatan yang berijin	Badan Mutu
Kompetensi	Perijinan	Sesuai profesi Masing-masing	% tenaga kesehatan yang Mempunyai ijin praktek	Badan Mutu dan Organisasi profesi
Kenyamanan	Perijinan	Fisik dan privasi	% sarana kesehatan yang berijin	Badan Mutu
Efektivitas	Akreditasi, Sertifikasi	Pengobatan, Program pencegahan	% sarana kesehatan yang terakreditasi	Lembaga eksternal lain
Hubungan interpersonal dan respect-caring	Akreditasi, Sertifikasi	Komunikasi provider Pasien	% sarana kesehatan yang terakreditasi	Lembaga eksternal lain

Pengorganisasian mutu di Sektor kesehatan

Bentuk pengorganisasian mutu	Jenis Organisasi	Tupoksi	Kualifikasi	Hasil Kegiatan
Seksi/Unit	Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten-Kota	<ol style="list-style-type: none"> 1. erencanaasistem mutu 2. Menyusun Rencana tindak lanjut 3. Menyusun Kebijakan Peningkatan mutu 4. Menyusu Pedoman dan indikator capian Mutu 	Pernah mengikuti pelatihan mutu	<ul style="list-style-type: none"> - Sistem Kesehatan Provinsi, Daerah - Kebijakan peningkatan mutu - Pedoman perijinan - Indikator kinerja
Tim atau Kelompok Jaminan Mutu atau Pokja	BP4, RB-BP, Lab Puskesmas, Praktek kelompok/ klinik	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun dokumen mutu - Monitoring evaluasi sistem mutu - Bertanggung jawab terhadap sistem manajemen mutu 		<ul style="list-style-type: none"> - Prosedur kerja - Standar pelayanan minimal - Hasil monitoring dan rencana tindak lanjut - Instrumen pemantauan mutu
Komite	Lembaga mutu ekterna (Badan Mutu)l, Rumah sakit & RSK			
Person in charge (contact person)	Apotek, praktek berkelompok, praktek mandiri	<ul style="list-style-type: none"> - Bertanggung jawab terhadap sistem manajemen mutu 		<ul style="list-style-type: none"> - Prosedur kerja

Garis besar program perbaikan mutu yang akan dilaksanakan

Upaya Pelayanan	RS & RSK	BP4	Puskesmas	BP/RB	Praktek kelompok/ Klinik	Praktek mandiri	Apotek	Lab	Upaya Pemantauan (Regulasi)	Lembaga Pelaksana	Lembaga Penanggung jawab	
Lisensi	Wajib untuk semua jenis sarana								Kegiatan pendataan wilayah	Badan Mutu	Dinas Kesehatan Provinsi/ Kabupaten- Kota	
Akreditasi	√	√	Tidak wajib					√	-	Badan Mutu/ Eksternal lain		
Sertifikasi	Tidak wajib								-	Eksternal		
Peraturan internal organisasi	√	√	Tidak wajib					Lisensi Awal		Badan Mutu		
Prosedur kerja	√	√	√	√	√	√	√					√
Instruksi kerja	√	√	√	√	√	√	√					√
SP Minimal	√	√	√	√	√	√	√	√	Lisensi ulang/ Perpanjangan			
Pola tarif	√	√	√	√	√	√	√	√	Lisensi Awal	Badan Mutu		
Std kompetensi SDM	√	√	√	√	√	√	√	√				
Pengukuran efektivitas Pelayanan	√	√	√	√	√	√	√	√	Lisensi ulang/ Perpanjangan; Akreditasi; Sertifikasi	Badan Mutu/ Eksternal lain		
Monitoring pelayanan	√	√	√	√	√	√	√	√				
Evaluasi Upaya perbaikan	√	√	√	√	√	√	√	√	Lisensi ulang/ Perpanjangan; Akreditasi; Sertifikasi			

MODEL QUALITY FRAME WORK PROPINSI DIY

Strategi perbaikan mutu dan regulasi

1. Penyusunan rencana pengembangan sumber daya manusia kesehatan untuk memenuhi persyaratan kompetensi dan registrasi
2. Penyusunan standar dan prosedur pelaksanaan regulasi baik melalui perijinan, sertifikasi dan akreditasi
3. Pelaksanaan uji kompetensi dikaitkan dengan kewenangan propinsi untuk mengeluarkan surat penugasan bagi tenaga kesehatan dan rekomendasi oleh organisasi profesi
4. Pelaksanaan peran Dinas Kesehatan sebagai penetap kebijakan regulasi dengan implementasi regulasi oleh Dinas kesehatan ataupun bekerja sama dengan badan independen (Badan Mutu Pelayanan Kesehatan)

Perubahan yang dapat dilakukan

1. Pelayanan kesehatan harus dapat menjamin keselamatan pasien melalui diterapkannya manajemen risiko
2. Regulasi pelayanan kesehatan diterapkan secara konsisten untuk sarana pelayanan kesehatan pemerintah maupun swasta dengan standar yang baku
3. Kinerja pelayanan kesehatan dimonitor dan dievaluasi secara berkesinambungan melalui indikator-indikator yang disepakati bersama
4. Pelaksanaan regulasi dimonitor dan dievaluasi secara periodik
5. Komitmen seluruh jajaran kesehatan untuk melaksanakan kerangka kerja mutu dan regulasi yang dievaluasi secara periodik

Indikator perbaikan yang dapat digunakan untuk mengukur perubahan

1. Pelaksanaan akreditasi bagi sarana pelayanan kesehatan rumah sakit maupun pelayanan medik dasar
2. % tenaga kesehatan yang mempunyai sertifikat kompetensi
3. % tenaga kesehatan yang mempunyai ijin praktek
4. % sarana kesehatan yang berijin
5. % sarana kesehatan yang mempunyai sistem manajemen mutu
6. % sarana kesehatan yang terakreditasi

Kondisi yang ingin dicapai

1. Semua sarana kesehatan mempunyai ijin pada akhir tahun 2010
2. Semua sarana kesehatan menerapkan sistem manajemen mutu pada akhir tahun 2010
3. 80% sarana kesehatan mempunyai tenaga klinis sesuai standar yang dipersyaratkan pada akhir tahun 2010
4. 80% sarana kesehatan mempunyai tenaga klinis yang teregistrasi pada akhir tahun 2010

Sasaran-sasaran mutu dan regulasi pelayanan kesehatan yang akan dicapai dalam periode lima tahun mendatang

Semua sarana kesehatan mempunyai ijin pada akhir tahun 2010

Semua sarana kesehatan menerapkan sistem manajemen mutu pada akhir tahun 2010

80% sarana kesehatan mempunyai tenaga klinis sesuai standar yang dipersyaratkan pada akhir tahun 2010

80% sarana kesehatan mempunyai tenaga klinis yang teregistrasi pada akhir tahun 2010

Dinas kesehatan mengembangkan dan menggunakan indikator-indikator bagi sarana pelayanan kesehatan mengacu pada dimensi mutu prioritas

Indikator monitoring mutu dan penilaian keberhasilan

Pelaksanaan akreditasi bagi sarana pelayanan kesehatan rumah sakit maupun pelayanan medik dasar

% tenaga kesehatan yang mempunyai sertifikat kompetensi

% tenaga kesehatan yang mempunyai ijin praktek

% sarana kesehatan yang berijin

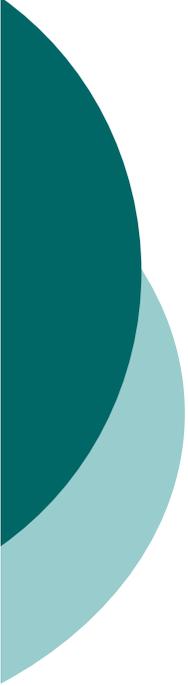
% sarana kesehatan yang mempunyai sistem manajemen mutu

% sarana kesehatan yang terakreditasi



Implementasi kerangka jaga mutu

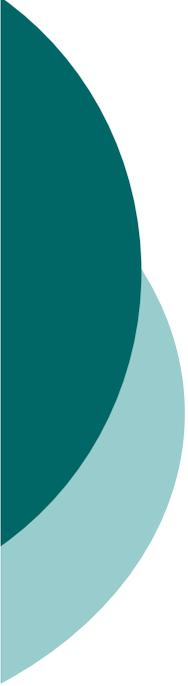
- Peningkatan jumlah RS yang terakreditasi (20 RS dari 43 RS)
- Dimulainya program akreditasi untuk puskesmas
- Pelaksanaan program Uji Kompetensi untuk seluruh fresh graduate Bidan dan Perawat
- Perbaikan proses perijinan awal dan perijinan ulang dengan menggunakan rekomendasi dari Badan Mutu



Implementasi kerangka jaga mutu

Telah mendapatkan sertifikasi ISO :

1. 23 puskesmas
2. BApelkes
3. Dinas Kesehatan Prop DIY
4. Badan Mutu PELayanan Kesehatan(BMPK)
5. Dinas kesehatan Sleman
6. Rumah sakit Grascia
7. RS. Dr. Sardjito
8. Balai Laboratorium kesehatan (BLK)



Perkembangan Badan Mutu Pelayanan Kesehatan

- Membantu dinas kesehatan dalam memberikan penilaian terhadap institusi kesehatan (RS, apotik dll)
- Membantu dalam uji kompetensi tenaga kesehatan (bidan, perawat, apotheker)
- Membantu dalam penilaian akreditasi pelayanan kes dasar
- Menjadi badan hukum PT. INQUASH



Penerapan Quality Frame work merupakan bukti akuntabilitas Dinas Kesehatan dalam merencanakan kegiatan-kegiatan peningkatan mutu dan mengembangkan pengukuran-pengukuran mutu klinis yang lebih terinci untuk melakukan perbaikan mutu secara berkesinambungan



Kesimpulan Implementasi Quality Frame Work Prop. DIY

- Terlaksananya Program GARBA dan optimalisasi peran JAMKESOS dalam penjaminan biaya kesehatan untuk masyarakat tidak mampu.
- Puskesmas mengikuti program Akreditasi dengan tim penilai dari Badan Mutu Pelayanan Kesehatan
- Beberapa RS dan puskesmas sudah berhasil mendapatkan sertifikasi ISO 9000:2000
- Beberapa RS sudah terakreditasi
- RS dan RSK terpantau perijinannya



selian dan timakasih